

PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

Angie Octaviany

NPP. 29.0530

Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email : angieoctaviany33@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem/Background (GAP) : (Contains the background behind the research). The author focuses on the problems experienced by officials managing information and community documentation related to public services in the form of public information disclosure.

Objectives: The purpose of this study is to identify and describe the role of information and documentation management officials in public information services in order to realize public information disclosure in Lampung Province. **Methods:** The method used in this research is a qualitative descriptive research method with an inductive approach. The data collection techniques used in this study were through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Results/Findings: The results show that the role of information management and documentation officials in this public information service can be said to be quite good.

Conclusion: The role of information management and documentation officials in this public information service can be said to be quite good. This is evident from the policies made in information services, the strategies achieved and good coordination with the regional apparatus to provide public information services by completing the facilities and infrastructure to provide services to the community.

Keywords: Public Information, Role of PPID, Service

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan yang dialami oleh para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi masyarakat terkait pelayanan publik berupa keterbukaan informasi publik. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelayanan informasi publik guna mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam

pelayanan informasi publik ini dapat dikatakan cukup baik. **Kesimpulan:** Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelayanan informasi publik ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terbukti dari kebijakan yang dibuat dalam pelayanan informasi, strategi yang dicapai dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan melengkapi sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Informasi Publik, Peran PPID, Pelayanan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di zaman modernisasi saat ini masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju serta masyarakat yang tidak lepas dari adanya teknologi dan melek internet. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat maka berpengaruh terhadap diri sendiri dan juga orang lain terutama pemerintahan di Indonesia yang bergerak menuju pemerintahan berbasis elektronik.

Kemajuan teknologi dan terus meningkatnya jumlah pengguna internet ini akan menimbulkan tantangan dan hambatan yang harus diwaspadai dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah. Perkembangan teknologi dalam hal positif dapat meningkatkan kinerja dalam berbagai kegiatan dimana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, dalam melaksanakan kegiatan tersebut pasti nya akan dihadapkan berbagai permasalahan dan tantangan bagi seluruh masyarakat dalam mendapatkan informasi yang ada.

Dalam melaksanakan pemerintahan Indonesia dalam usaha mewujudkan tujuan Negara dengan merata kepada semua masyarakat Indonesia, maka Negara Indonesia dibagi menjadi provinsi dan provinsi terbagi lagi menjadi kabupaten serta kota, dan di setiap provinsi, kabupaten, serta kota pasti mempunyai pemerintahan daerah.

Urusan pemerintah daerah tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana urusan pemerintahan daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan dari pemerintah pusat dan menjadi landasan dari pelaksanaan otonomi daerah atas dasar tugas pembantuan, serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintah daerah mendapat kewenangan dari presiden untuk melaksanakannya di limpahkan kepada gubernur dan bupati atau walikota serta di biayai oleh APBN. Salah satu kewenangan urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan konkuren, dalam urusan pemerintahan konkuren terdapat beberapa urusan pemerintahan salah satu nya yaitu komunikasi dan informatika. Komunikasi dan informatika harus ada guna melaksanakan pelayanan publik terhadap masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan PPID, struktur organisasi PPID pada Provinsi Lampung terdiri atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama terdiri atas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu terdiri atas Badan, Dinas Inspektorat, Satpol PP, dan juga Sekretariat Daerah.

Guna menjalankan tugasnya dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung membuat sebuah inovasi guna meningkatkan penyebaran informasi publik berbasis online dalam bentuk website yaitu <https://ppid.lampungprov.go.id/>. Website tersebut dibuat dari tahun 2018, sesuai

dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung, dengan memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi.

Website ini dibuat agar masyarakat dengan mudah dapat mengakses melalui portal atau shortcut kedalam website yang berisikan berbagai data terkait berbagai macam informasi yang di keluarkan dari Organisasi Perangkat Daerah yang lainnya serta sebagai alat pengawasan dalam capaian kinerja Aparatur Negara dalam pemerintahan Provinsi Lampung sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya tanpa perlu datang ke lokasi.

Terdapat beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya permohonan informasi setiap tahunnya karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan, menyebabkan pemahaman masyarakat tentang Standar Operasional Prosedur permohonan informasi dirasa kurang, itulah indikator yang menyebabkan banyaknya permohonan informasi yang masih belum terkabulkan di PPID Provinsi Lampung.

Dalam perwujudan pelayanan publik yang efektif dan efisien PPID di provinsi Lampung, masih ditemukan berbagai kendala yang lain yaitu masih kurangnya fasilitas kerja yang belum lengkap seperti *desk* pelayanan informasi seperti komputer, printer dan fasilitas lainnya untuk menunjang pelayanan informasi publik karena merupakan komponen yang wajib dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

Kemudian masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar unit kerja belum berjalan baik, yaitu terkait permohonan informasi, pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal, dan banyaknya ketidakpuasan pemohon informasi dalam menerima jawaban informasi yang diberikan oleh PPID, serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, yaitu penelitian Ira Novita, Nofika Hendra, dan Danang (2019) yang Berjudul Peranan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berperan sebagai Administrator, Fasilitator, Operator Sistem Informasi dan Evaluator dalam hal pelayanan informasi publik. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik adalah masih kurangnya kerjasama antar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan staf bagian, kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai informasi publik, dan tidak lengkapnya sarana layanan informasi publik untuk mendukung pelayanan informasi publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Penelitian kedua, yaitu penelitian Sintar (2019) yang berjudul Strategi Pelayanan Informasi Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diketahui ada 3 strategi pelayanan siaran yang digunakan lembaga penyiaran publik yaitu siaran harus bersifat netral, tidak komersial, dan independent. Dengan upaya meningkatkan kompetensi SDM agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi komunikasi, dan dapat segera menggunakan aplikasi yang telah ditentukan oleh komisi informasi pusat sehingga mampu bersaing dengan Lembaga publik lainnya.

Penelitian ketiga, yaitu penelitian Ivano Rato (2019) yang berjudul Efektivitas Kinerja PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang Dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya PPID itu didirikan bertujuan untuk mempermudah sebuah instansi dalam menyebarkan informasi dokumentasi yang terdapat pada instansi2 terkait. Kendala dari efektivitas kinerja ppid ini ada 2 yaitu Faktor yang berasal dari

dalam instansi dalam hal ini yaitu terdapat pada tingkat analisa ASN dalam rangka menjabarkan sistem-sistem yang ada, sehingga ASN dituntut untuk cerdas dan paham dalam pelaksanaan PPID yang ada. Sehingga wartawan/jurnalis sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik/masyarakat karena tidak berfungsinya website tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian terdahulu meneliti tentang PPID dalam pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan berpedoman pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori Horoepoetri Arimbi dan Santosa dan fokus penelitian dimana penulis lebih berfokus pada peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan informasi publik di Provinsi Lampung.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelayanan informasi publik guna mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menganalisis Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan menggunakan teori Peran (Arimbi, Horoepoetri, 2003:91) yakni peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, dan peran sebagai alat komunikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, dan Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai media informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi Lampung menggunakan Teori Peran (Arimbi, Horoepoetri, 2003:91) yakni Peran sebagai Kebijakan, Peran sebagai Strategi, dan Peran sebagai Alat Komunikasi. Adapun hasil pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Peran Sebagai Kebijakan

Peran sebagai kebijakan artinya pejabat PPID melaksanakan perannya untuk menjadi perwakilan dari PPID Provinsi Lampung dalam setiap kesempatan untuk membuat, merundingkan dan mengambil keputusan setiap ada persoalan yang timbul. Setiap pejabat berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya. Peran sebagai Kebijakan memiliki arti bahwa peran dilakukan dengan tujuan untuk mewakili suatu organisasi yang di pimpinnya untuk mengambil suatu keputusan yang dibuat bersama baik dan tepat untuk dilakukan bagi suatu organisasi yang di pimpinnya. Terdapat dua indikator dalam peran sebagai kebijakan yang pertama yaitu regulasi informasi yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi indikator kebijakan. Indikator dalam peran sebagai kebijakan salah satunya adalah tugas pejabat yang memegang PPID sebagai pembina di PPID Provinsi Lampung. PPID akan berjalan dengan baik apabila sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan dan hasilnya yaitu PPID sudah dijalankan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu PPID ini wajib ada di setiap lingkup pemerintahan baik di Kabupaten maupun di lingkup Provinsi yang sudah diperkuat

dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung mengenai keharusan adanya PPID ini dan juga Peraturan Komisi Informasi. Yang Kedua yaitu Penetapan Standar Layanan Informasi yang merupakan suatu penentuan atau penilaian ukuran terhadap suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat dan hasilnya yaitu setiap informasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat melalui aplikasi atau website PPID memiliki standar dan kriteria seperti apa informasi yang wajib di berikan dan informasi yang di kecualikan, jadi tidak hanya semata meta informasi yang didapat langsung di berikan kepada masyarakat, tetapi informasi tersebut harus di saring dan di Kelola terlebih dahulu sebelum di berikan kepada masyarakat.

3.2. Peran Sebagai Strategi

Peran sebagai strategi artinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membuat sebuah rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kedepannya. Ada dua indikator dalam peran sebagai strategi yang pertama yaitu penetapan sasaran yang mana merupakan Langkah-langkah atau tindakan berkelanjutan yang diambil dalam arah tertentu. Langkah Langkah yang di lakukan oleh PPID Provinsi Lampung yaitu dengan menyediakan sarana penunjang dalam melayani masyarakat untuk memberikan informasi yang di butuhkan masyarakat dan hasilnya dapat diketahui bahwa Langkah – Langkah yang dilakukan pejabat PPID Provinsi Lampung dalam memberikan informasi kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk melayani masyarakat jika ada yang datang langsung ke kantor maupun berbasis online. Yang kedua yaitu program kerja dalam hal ini merupakan suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah di tentukan oleh suatu organisasi. Dalam hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 1

Program dan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Program / kegiatan	Indikator sasaran	Target kinerja	realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelolaan dan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pengelolaan monitoring opini dan aspirasi publik	15 kab/kota	15
2.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	Jumlah Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	230 orang	230
3.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi publik	63 OPD	63
4.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik	1110 Bahan Berita	1.000,,00
5.	Pengelolaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah partisipasi aktif sumber daya komunikasi publik	50 kali	38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Hubungan dan Kerjasama media	Jumlah Hubungan dan Kerjasama media publik	3 media	3
7.	Pelayanan administrasi perkantoran KPID	Jumlah pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran KPID	12 bulan	0
8.	Koordinasi KPID dengan Lembaga lain	Jumlah Koordinasi KPID dengan Lembaga lain terkait penyiaran	1 kali	1 kali
9.	Pembinaan dan pengawasan Lembaga penyiaran	Jumlah Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga penyiaran yang dilakukan secara rutin ²	2 kali	2 kali
10.	Optimalisasi Kelembagaan	Jumlah Lembaga yang melakukan Kerjasama (MOU)	4 dokumen	4 dokumen

Sumber : Renstra DiskominfoProvinsi Lampung Tahun 2021

Indikator yang ketiga yaitu pembagian kerja yang merupakan suatu penggolongan semua pekerjaan berdasarkan keahlian yang dimiliki orang yang bersangkutan yang menjadi tanggungjawab yang di emban dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung memiliki pembagian kerja yang masing-masing mempunyai tanggungjawabnya sendiri. Dalam hal ini pada bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, dstandar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi publik dan layanan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi, serta pelayanan informasi publik di lingkup pemerintah Provinsi.

3.3. Peran Sebagai Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan baik secara langsung melalui lisan maupun secara tidak langsung melalui media, dengan tujuan untuk mempengaruhi pemikiran seseorang untuk melakukan sesuatu. Komunikasi di lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam menunjang interaksi antara atasan dengan bawahan, dan orang lain yang berada di luar organisasi yang dipimpinnya. Terdapat dua indikator dalam peran sebagai komunikasi yang pertama yaitu koordinasi antara perangkat daerah yang mana Koordinasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk kegiatan yang mana pimpinan mengembangkan pola usahanya secara teratur antar bawahan dan menjamin setiap kegiatan bisa dicapai sesuai dengan tujuan. Dalam melakukan suatu tugas bagi seorang pimpinan harus selalu melakukan koordinasi kepada siapapun, jika tidak ada koordinasi dengan siapapun maka tidak akan ada informasi yang bisa didapatkan dan di sebar oleh PPID Provinsi Lampung, dan hasilnya bahwa sampai saat ini koordinasi yang dilakukan PPID kepada perangkat daerah berjalan dengan baik karena PPID Provinsi sendiri memiliki Grup *whatsapp* yang di dalamnya terdiri dari masing-masing PPID perangkat daerah yang sudah bergabung sehingga memudahkan dalam memberi dan menerima masukan-masukan informasi. Indikator kedua yaitu pemberian informasi dan dokumentasi dimana Informasi merupakan kumpulan data dan fakta yang telah disaring dan dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat. Informasi ini selanjutnya akan diberikan kepada seluruh masyarakat melalui PPID ini. Informasi yang diberikan ini merupakan salah satu faktor penting untuk menambah

wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang membutuhkannya, Sedangkan dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus seperti tulisan, undang-undang, dan sebagainya, dan hasilnya bahwa informasi yang di berikan kepada masyarakat tidak semerta – merta langsung diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, namun informasi yang di minta dan yang di berikan tersebut harus di Kelola terlebih dahulu, jika sesuai dengan undang-undang yang telah di tentukan maka informasi tersebut akan di berikan kepada masyarakat dan akan di umumkan di laman website maupun aplikasi PPID. Namun jika informasi yang diminta tidak sesuai dengan undang-undnag yang telah ditetapkan maka informasi tersebut tidak akan di proses lebih lanjut dan tidak akan diumumkan di laman website ataupun aplikasi PPID.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Persamaan temuan penelitian Ira Novita, Nofika Hendra, dan Danang (2019) dari penelitian ini yakni metodologinya deskriptif kualitatif, penelitian sebelumnya berfokus pada peran Pejabat PPID penyebaran dengan melihat peran sebagai administrator, fasilitator, operator sistem informasi dan evaluator pada instansi pemerintah. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berperan sebagai administrator, fasilitator, operator sistem informasi dan evaluator dalam hal pelayanan informasi public, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pelayanan informasi yang dilakukan instansi pemerintah melalui *website* maupun secara langsung. Temuan Sintar (2019) dari penelitian ini yaitu mengenai Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Perbedaan penelitian terdahulu membahas Strategi pelayanan informasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan menggunakan 3 strategi pelayanan siaran yang digunakan lembaga penyiaran publik yaitu siaran harus bersifat netral, tidak komersial, dan independent, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori peran bukan teori strategi dengan fokus penelitian pada kebijakan, strategi dan alat komunikasi yang dilakukan oleh pejabat Diskominfo Provinsi Lampung. Dan Temuan penelitian Ivano Rato (2019) dari penelitian ini yakni mengenai efektivitas kinerja PPID dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas adanya PPID itu didirikan bertujuan untuk mempermudah sebuah instansi dalam menyebarkan informasi dokumentasi yang terdapat pada instansi-instansi terkait, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan keterbukaan informasi dengan menggunakan teori dari Horoepoetri, Arimbi dan Santosa.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelayanan informasi publik ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terbukti dari kebijakan yang dibuat dalam pelayanan informasi, strategi yang dicapai dan koordinasi dengan perangkat daerah untuk memberikan pelayanan informasi publik. Pejabat yang bertanggung jawab dalam PPID Provinsi Lampung sudah melakukan berbagai langkah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dengan melengkapi sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika meminta informasi kepada PPID Provinsi Lampung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari. penulis

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis memfokuskan hasil penelitian peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai media informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di harapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dan pemerintah daerah kedepannya khususnya Dinas terkait dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan seluruh pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. N. (2011). Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen, Komarudin Tasdik.
- Diah fatma sjouraida. (2012). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Elysia, Vita, A. W. and S. (2017). Implementasi E-Government Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Di Indonesia. Optimalisasi Peran Sains Dan Teknologi Untuk Mewujudkan Smart City, 353–380.
- Hendra, N. (2016). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik (Vol. 9, Issue August).
- Horoepoetri, A. santosa. (2003). Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan, Jakarta: walhi.
- Ideal, I. R., Negara, I. A., Padang, U. N., Barat, A. T., Keterbukaan, M., Kepada, I., Organisasi, P. T., & Publik, P. (2019). Efektivitas Kinerja Ppid Pada Sekretariat Dprd Kota Padang Dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik.
- Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang) Oleh. (N.D.). 1–33.
- Indah, T., Ilmu, P., Universitas, K., Indonesia, I., Hariyanti, P., Ilmu, P., Universitas, K., Indonesia, I., Daya, S., & Publik, K. I. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. 12(November 2017), 127–140.
- Khaerani, T. R., & Sarai, M. V. (2020). Analisis Pengembangan Electronic Government Di Kota Tegal. JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi, 8(3), 79–86.
- Nababan, S. (2019). Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. 166–180.
- Napitupulu, P. (2012). Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction. PT.Alumni.
- Nasution, M. S. (n.d.). Peran kelembagaan Dalam Pengelola Berkelanjutan Danau Bakuok. 5–10.
- Novita, I. (2019). Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Ayan.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, (2019). Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya, Media Sahabat Cendekia
- Paribrata, A. I. (2017). Volume 1 Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016 Tahun-tahun Undang Komisi Informasi Publik) menerapkan Undang Undang Komisi, 131–162.

Ratna, D. B. (2018). Strategi Layanan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

Suwartono, (2010). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Cv Andi Offset

Siyoto, D. S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian (Ayup (Ed.); cetakan 1). Literasi Media Publishing.

Soekanto. (2017). Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau. Program S1 Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Sosisal* .pdf.

Trijayanto, D., & Idrus, I. A. (2019). Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. *Ikraith-Humaniora*2, 3(1), 107–117

